



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Mampang Prapatan IV Jl. K No.37 Jakarta Selatan Tlp 021-7947608
Email: sekretariat@seknasfitra.org

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.001/29/IX/13
Judul	Pemda Miskin Informasi Anggaran	Tanggal	29-09-2013
Sub Judul	Kerugian Daerah TA 2011, 2.135 KASUS SENILAI Rp 1.2Triliun	Tahun	2013
Event Terkait Kata Kunci	Keterbukaan Informasi	Penulis	M. Maulana

Press Release

Pemda Miskin Informasi Anggaran;

Kerugian Daerah TA. 2011, 2.135 kasus senilai Rp 1,2 Triliun

Anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan hanya berhak diketahui segelintir orang saja. Padahal, anggaran adalah bagian dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, No. 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan menyediakan satu kanal/ menu khusus “Transparansi Pengelolaan Anggaran” yang didalamnya mesti mempublikasikan 12 dokumen anggaran berikut :

1. Ringkasan RKA SKPD
2. Ringkasan RKA PPKD
3. Rancangan Perda APBD
4. Rancangan Perda Perubahan APBD
5. Perda APBD
6. Perda Perubahan APBD
7. Ringkasan DPA SKPD
8. Ringkasan DPA PPKD
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD
11. LKPD (audited)
12. Opini BPK-RI atas LKPD

Selain 12 dokumen anggaran tersebut, pemerintah daerah sebagai badan publik juga diharuskan mempublikasikan informasi pengadaan barang dan jasa, informasi profil yang diantaranya terdiri dari informasi alamat kantor pemda serta struktur organisasi, serta informasi terkait dengan sistem pelayanan informasi publik. Hal ini sebagaimana dimandatkan Pasal 9 UU 14/2008 tentang KIP serta Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP).

Akan tetapi, **Pemerintah Daerah Masih Miskin Informasi Anggaran**. Berdasarkan hasil penelusuran Seknas FITRA pada awal bulan september ini, terhadap 193 website pemerintah daerah yang tersebar di 9 propinsi, kondisi ini disebabkan karena :

1. **Mayoritas Pemda masih menganggap tabu informasi anggaran.** Hal ini terlihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website. Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih dibawah 25%.
2. **Informasi Anggaran tidak dipublikasikan secara berkala setiap tahun.** Mayoritas daerah hanya mempublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja. Misalnya satu daerah mempublikasikan anggaran pada tahun 2012, tetapi tidak mempublikasikannya kembali pada tahun 2013.
3. **Pemda Pilih-pilih dokumen anggaran yang dipublikasikan.** Misalnya, Perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan dengan Rancangan Perda APBD. APBD perubahan lebih tertutup dibandingkan dengan APBD Murni.

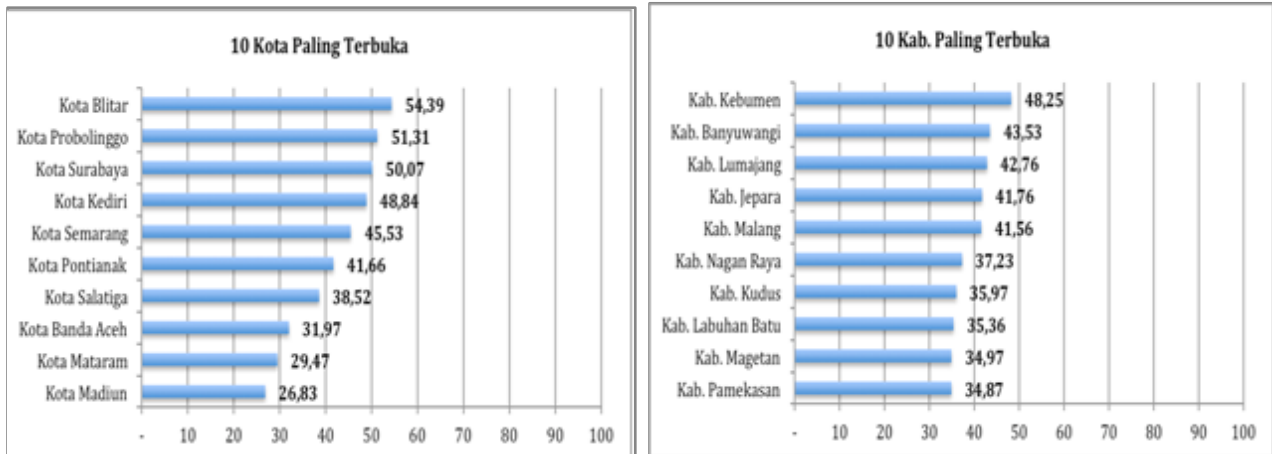
Hasil Penelusuran Dokumen Anggaran Di 193 Kabupaten/ Kota

No	Dokumen Anggaran Yang Ditelusuri	Tahun Anggaran							
		2010		2011		2012		2013	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	RAPBD					14	7%	13	7%
2	Perda APBD			35	18%	45	23%	32	17%
3	RAPBD Perubahan			8	4%	9	5%	4	2%
4	Perda APBD Perubahan			17	9%	21	11%	3	2%
5	LKPD	19	10%	24	12%	8	4%		

Akibat tertutupnya pemerintah daerah atas informasi anggaran tersebut, berpotensi membuat keuangan daerah dirugikan karena rendahnya pengawasan publik. Di tahun 2011 hasil audit BPK menemukan 2.135 kasus kerugian daerah senilai lebih dari Rp 1,2 Triliun di seluruh pemerintah daerah.

Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Secara Berkala

Berdasarkan pada hasil penelusuran anggaran pada 193 pemda, Seknas FITRA menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran secara Berkala. Penyusunan indeks dilakukan dengan mengelompokkan wilayah perkotaan dan kabupaten karena perbedaan kapasitas fiskal. Indeks disusun berdasarkan ketersediaan, akses, serta kecukupan informasi yang wajib dipublikasikan yang terdiri dari informasi Profil Pemda, Informasi Anggaran, dan Informasi Sistem Pelayanan informasi publik. Penentuan indikator mengacu pada Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1/2010 serta Instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Perhitungan indeks memberikan skor lebih tinggi untuk informasi anggaran.



Grafik di atas menunjukkan bahwa :

1. Kota Blitar menempati peringkat pertama dalam Indeks keterbukaan informasi pemda menyediakan informasi anggaran untuk wilayah perkotaan dengan skor 54,39. Disusul oleh Kota Probolinggo dan Kota Surabaya di peringkat kedua dan ketiga dengan skor masing-masing 51,31 dan 50,07. Ketiga kota ini telah mempublikasikan informasi anggarannya tidak hanya pada satu tahun anggaran saja. Melainkan informasi anggaran dipublikasikan setiap tahunnya.
2. Di peringkat keempat hingga kesepuluh ditempati oleh Kota Kediri, Kota Semarang, Kota Pontianak, Kota Salatiga, Kota Banda Aceh, Kota Mataram, dan kota Madiun.
3. Sementara untuk wilayah kabupaten, Kebumen menempati peringkat pertama dengan skor 48,25. Diikuti oleh Kab. Banyuwangi (43,53), dan Kab. Lumajang (42,76).

Berdasarkan temuan-temuan ini, Seknas FITRA merekomendasikan :

1. Kementerian dalam negeri memberikan reward kepada pemda yang mempublikasikan informasi anggarannya dan punishment kepada pemda yang menutup informasi anggaran. Dengan memberikan insentif atau disinsentif anggaran. Sebagaimana yang diberlakukan untuk ketepatan waktu penetapan APBD.
2. DPRD tingkat daerah untuk mendorong pemda mempublikasikan informasi anggaran kepada publik melalui media informasi yang dapat diakses publik secara luas.

Jakarta, September 2013

Salam,

Maulana

Koord. Advokasi Seknas FITRA

maulana@seknasfitra.org / 081382828670